

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia – Narasumber UI
TEMA : Demokrasi Ajarkan Kesabaran
SURAT KABAR/MAJALAH : Kompas

Hari Sabtu Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2008 Halaman 5 Kol 1 - 8

RINGKASAN

Desentralisasi bagai pisau bermata dua yaitu daerah dapat mengatur dirinya sendiri, namun dapat memberikan celah bagi elite lokal untuk berkuasa. Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli yang juga Direktur Desk Pilkada Pusat Kajian Politik FISIP UI dan staf pengajar program sarjana dan pascasarjana Ilmu Politik UI, salah satunya karena kesempatan terbuka untuk bersaing tidak termanfaatkan dengan baik oleh kelompok idealis yang setia mengabdikan pada kepentingan rakyat, sedangkan elite lokal dapat memanfaatkan demokrasi sebagai kendaraan untuk menguasai politik dan *resources* di tingkat lokal

CATATAN:

SOSOK DAN PEMIKIRAN

Demokrasi Ajarkan

Kesabaran

Desentralisasi bagai pisau bermata dua: memberikan ruang lebih banyak pada daerah untuk mengatur dirinya sendiri, namun juga memberikan celah bagi orang kuat lokal untuk berkuasa. Fenomena local bossism muncul seiring dengan demokratisasi, mereka memakai mekanisme demokrasi yang ada. Kelompok ini yang terus mengakumulasi kekuasaan dengan membajak institusi demokrasi dan membangun aliansi dengan pejabat publik.

Oleh SIDIK PRAMONO

Bagi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, hal itu salah satunya karena kesempatan terbuka untuk bersaing tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok idealis yang setia mengabdikan pada kepentingan rakyat. Lebih banyak yang memilih "berteriak" di luar dan menganggap yang lain sebagai "musuh". Pertarungan internal antar kelompok idealis itu yang menjadikan elite lokal yang pragmatis berkuasa.

Berikut petikan wawancara dengan Lili di ruang kerjanya yang sederhana di Gedung LIPI, Jakarta, akhir Desember 2007.

Bagaimana Anda melihat praktik desentralisasi?

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menguatkan kembali bos-bos lokal. Kelompok ini memanfaatkan demokrasi sebagai kendaraan untuk menguasai politik dan *resources* di tingkat lokal. Di Banten kebetulan bos lokalnya jawara. Di daerah lain bisa saja namanya lain; bisa kiai, bisa pengusaha.

Bos lokal ini tak langsung berkuasa, tetapi mereka mengatur semuanya lewat orang yang menjadi kepanjangan tangannya. Mereka bisa menempatkan orangnya di eksekutif dan legislatif sepanjang mau mengabdikan untuk kepentingan mereka.

Bagaimana dibandingkan masa Orde Baru?

Zaman Orde Baru dulu lebih selektif. Yang duduk yang mau dikendalikan atau bagian dari rezim. Mereka dipasang untuk menjaga kepentingan rezim, demi *status quo*. Yang terjadi sekarang, mereka melakukannya untuk kepentingan sendiri atau

kelompoknya. Perilaku sama di daerah, hanya petanya berbeda.

Dampaknya....

Jelas. Posisi negara terancam ketika negara tidak berdaya menghadapi bos lokal ini. Demokrasi pun terancam. Yang berjalan hanya prosedurnya saja, namun demokrasi yang substantif tidak dilakukan. Kalau dalam bahasa (lembaga kajian) Demos, ini pembajakan demokrasi oleh elite lokal. Semuanya di bawah kontrol satu kekuatan. Bos lokal bisa mengoptasi partai politik, DPRD, dan kekuatan ekonomi. Di daerah, ketika bos lokal menguat seperti itu mestinya masyarakat sipil (*civil society*) yang mengontrol. Sekarang ini jelas ada lawan, jadi jangan malah bermain sendiri-sendiri.

Lantas, perspektif ke depan seperti apa?

Kalau melihat seperti itu, perspektifnya memang menjadi buram. Ini tantangan untuk membangun kekuatan masyarakat sipil. Di tingkat negara, harus ada penegakan hukum yang berjalan dengan tegas. Jangan malah ada main mata antara penegak hukum dan elite lokal. Ini masa transisi, praktik seperti itu harus diakhiri. Kita harus mengkonsolidasikan lagi demokrasi, memperkuat sistem, memperjelas aturan main.

Apakah masih ada peluang?

Kesempatan selalu ada. Namun karena yang idealis tidak memanfaatkan, kekosongan itulah yang dimanfaatkan yang lain. Pilihannya: mau idealis atau yang pragmatis? Kesempatan berkompetisi sudah diberikan. Itu yang mesti dimanfaatkan.

Sayangnya, mereka yang punya intelektualitas dan idealisme



KOMERAS/TOTOK WILJAYANTO

tinggi tidak mau terjun. Kalangan LSM atau akademisi tak mau. Jadi, sebenarnya ini kesalahan kita juga, kesalahan kelompok idealis yang tidak mau masuk ke wilayah itu. Salah satu alasan, masuk ke wilayah itu butuh modal besar. Juga mereka takut terkontaminasi. Itu kendala.

Namun, sebenarnya masuk ke wilayah itu tidak sepenuhnya harus bermodal besar. Demokrasi tidak mensyaratkan itu. Prinsip ekuualitas ada dalam demokrasi. Setiap orang diberi kesempatan untuk masuk. Itulah yang membuat saya setuju calon perseorangan tidak dibebani syarat yang berat, termasuk soal deposit. Calon perseorangan sebenarnya salah satu solusi. Tetapi, kalau untuk maju lewat jalur perseorangan malah dihambat, itu yang harus dihindari.

Yakinkah kendala dana bisa diatasi?

Orang memilih bukan semata-mata duit yang menjadi ukuran. Selama punya kemampuan, jaringan bekerja, dan saling membantu, orang mau diajak gotong royong memberikan dukungan. Namun kalau kita hanya mau mengkritik, lama-lama juga tak akan didengarkan. Jadi, harus mau masuk ke wilayah itu. Jika tidak, *status quo* kokoh.

Amanah pada parpol

Akhir 2007, Lili menuntaskan

program doktornya di Universitas Indonesia dengan mempertahankan disertasi berjudul *Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)*. Pilihan topik disertasinya pas bagi bapak empat anak yang asli Banten ini.

Kini, selain kesibukannya di Pusat Penelitian Politik LIPI, ia juga aktif di Pusat Kajian Politik UI dengan membawahi masalah pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kesibukan mengajar di sejumlah perguruan tinggi dan permintaan sebagai "seminaris" menjadikannya harus berbagi waktu. Hal yang tidak jauh berbeda dengan sebagian peneliti lainnya yang juga supersibuk dengan kegiatan di luar LIPI.

Adakah harapan untuk mengembalikan demokrasi yang substantif?

Partai politik semestinya juga mengambil peran. Harapan kita ada pada parpol, lebih-lebih di Indonesia ini demokrasi semua diambil alih parpol. Menyakitkan kalau parpol tidak memainkan peran dan malahan dikendalikan. Jangan malah seperti ada *remote control*. Mestinya parpol sadar kalau mereka hanya dijadikan alat.

Jelas kita perlu elite parpol yang paham dan menjalankan rekrutmen politik untuk menjaring orang yang punya idea-

lisme. Tidak lagi bisa dipertahankan sikap pragmatis, orang yang hanya mencari kekuasaan dan penghidupan. Kalau seperti itu wajar saja kalau akhirnya mereka mudah dikendalikan sepanjang tujuan itu tercapai. Praktik itu berbahaya. Ketika masyarakat kecewa terhadap parpol, lantas demokrasi yang disalahkan.

Caranya....

Parpol harus memperbaiki rekrutmen, jangan popularitas saja. Jangan rakyat dipaksa memilih yang tidak disukai. Semua memang harus dikonsultasikan dengan rakyat, bukan formalitas saja. Jangan elite berpikir sendiri, tidak pernah mengikuti apa yang dipikirkan rakyat. Itu elite yang tidak berempati dengan rakyat.

Parpol mesti demokratis sebab mereka mengemban amanah. Aktor yang ada harus yang menjadi pendukung demokrasi, bukan yang akan membajaknya. Ini tantangan kita semua. Kalau yang baik masih bertahan di luar, kesempatan diambil yang lain.

Adakah kritik untuk mereka yang masih berada "di luar"?

Selama ini pandangannya masih menganggap parpol, negara, atau birokrasi itu sebagai "lawan", seperti masa sebelumnya. Ketika terjadi perubahan, anggapan tetap seperti itu. Akibat-

5

Biodata LILI ROMLI

- ◆ Tempat, tanggal lahir: Serang, 10 Maret 1964
- ◆ Pendidikan:
 - Doktor Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (2007)
 - Magister Ilmu Politik FISIP UI (2003)
 - Sarjana Ilmu Politik FISIP UI (1990)
- ◆ Pekerjaan:
 - Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
 - Direktur Desk Pilkada Pusat Kajian Politik FISIP UI
 - Staf pengajar Program Sarjana dan Program Pascasarjana Ilmu Politik, UI, Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas, serta STIKOM Interstudi dan IISIP Jakarta
- ◆ Beberapa Penelitian:
 - Penelitian Pemilu dan Partai Politik pada P2P LIPI (2003-2005)
 - Penelitian Pemilu pada P2P LIPI (2001-2007)
 - Penelitian Otonomi Daerah pada P2P LIPI (2000-2004)
 - Penelitian Pola dan Kecenderungan Rekrutmen Anggota DPRD dan Performance Partai Politik di DPRD, kerjasama P2P LIPI dengan IMD Belanda (2004-2005)
 - Tim Revisi RUU Otonomi Daerah versi LIPI (2004)
 - Tim Revisi RUU Politik versi LIPI (2007)
 - Survei pra-pilkada di Kalimantan Timur, Maluku Utara, DKI Jakarta, Riau, Kota Bekasi, Sumatera Utara, dan Jawa Barat oleh Ruskapol UI
- ◆ Beberapa Tulisan:
 - Penulis buku "Islam Yes, Partai Islam Yes" (2004)
 - Penulis buku "Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal" (2007)
 - Editor dan penulis "Menggugat Partai Politik" (2003)
 - Editor dan penulis "Potret Partai Politik Pasca Orde Baru" (2003) serta sejumlah buku lainnya

nya, ada kekosongan. Itu dimanfaatkan pihak lain. Lebih celaka lagi, parpol dan negara dimaki. Kita ini hanya bisa menyalahkan.

Tugas masyarakat sipil itu mengontrol elite dan parpol. Mengontrol bukan membenci. Bagaimanapun parpol itu pilar demokrasi. Yang penting, kita tidak jenuh meneriaki. Tunjukkan kesadahan dengan bukti yang lengkap agar tidak menjadi fitnah.

Rakyat adalah penentu keadailatan. Pengalaman pilkada di beberapa provinsi, kalahnya *incumbent* menunjukkan rakyat butuh orang baru, kalau yang lama dianggap tidak berhasil.

Kita harus terus mendorong rakyat memilih secara rasional. Saya sangat percaya rakyat akan menemukan kedewasaan.

Masih adakah harapan?

Ini memang proses coba salah, coba salah. Jadi, ada proses penghukuman. Jika salah pilih, lima tahun kita harus menerima konsekuensinya. Demokrasi mengajarkan kesabaran. Jika terus belajar, suatu saat rakyat akan cerdas memilih. Demokrasi tak bisa instan, harus *step by step*. Jika sampai lahir pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan, itu memberikan "hukuman" pada demokrasi. Namun jangan sampai demokrasi yang disalahkan.

51